



Pesantren dan Lahirnya Diskursus Moderasi Beragama di Indonesia

Ria Ratna Ningtyas¹, Abdul Khobir²

^{1,2}*Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia*

¹riaratna519@gmail.com

²abdul.khobir@uingusdur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pesantren dalam memunculkan serta mempertahankan diskursus moderasi beragama di Indonesia yang kompleks.

Dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis penelitian pustaka, artikel ini menggambarkan kontribusi pesantren dalam menjaga harmoni sosial dan relevansinya dalam membangun wacana moderasi beragama yang inklusif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penelitian menyimpulkan bahwa: Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memainkan peran strategis dalam membangun dan mempraktikkan moderasi beragama. Pesantren tidak hanya menjadi benteng perlindungan terhadap radikalisme, tetapi juga menciptakan diskursus keagamaan inklusif melalui pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan). Namun, dinamika kontemporer menghadapkan pesantren pada tantangan seperti munculnya paham transnasional dan polarisasi agama.

Kata Kunci: Pesantren; Diskursus; Moderasi Beragama; Indonesia

Abstract

This article aims to analyze the role of pesantren in initiating and maintaining the discourse of religious moderation in the complex context of Indonesia.

Using a descriptive-analytical approach based on literature research, the article illustrates the contribution of pesantren in maintaining social harmony and its relevance in developing an inclusive religious moderation discourse.

Based on the analysis, the article concludes that pesantren, as the oldest Islamic educational institution in Indonesia, plays a strategic role in building and practicing religious moderation. Pesantren not only serve

as a stronghold against radicalism but also create an inclusive religious discourse through education that emphasizes the values of tawasuth (moderation), tasamuh (tolerance), and i'tidal (justice). However, contemporary dynamics present pesantren with challenges such as the emergence of transnational ideologies and religious polarization.

Keywords: *Pesantren; Discourse; Religious Moderation; Indonesia*

PENDAHULUAN

Sejak beberapa tahun terakhir, moderasi beragama menjadi konsepsi yang menarik dan ramai diperbincangkan oleh berbagai institusi. Kementerian Agama RI adalah salah satu instansi yang secara serius dalam mengkampanyekan konsep moderasi beragama ini. Dalam unggahan kemenag.go.id pada April 2023 terlihat Kamaruddin Amin sebagai Dirjen Bimas Islam menjelaskan betapa pentingnya konsep moderasi beragama untuk diaktualisasikan dalam konteks Indonesia.

Secara konseptual moderasi beragama digadag-gadangkan sebagai solusi disetiap permasalahan yang menyangkut perpecahan antar umat beragama. Kemenag sendiri mengklaim bahwa secara prinsip moderasi beragama adalah penengah antara golongan yang ekstrim ke kiri dan ke kanan.¹ Disamping itu paham moderasi beragama ini memberikan jawaban dari permasalahan sosial, seperti kasus praktik intoleransi dengan adanya penolakan terhadap umat berebeda agama. Kasus nyata berikutnya misalkan berkaitan dengan politik praktis yang seringkali dihubung-hubungkan dengan isu agama sehingga menimbulkan perpecahan.²

Pada konteks tersebut, Pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, memainkan peran strategis dalam mengembangkan dan mempraktikkan moderasi beragama. Menurut Azyumardi Azra, pesantren memiliki sejarah panjang sebagai pusat pendidikan yang memadukan ajaran Islam dengan kearifan lokal, menciptakan tradisi keislaman yang ramah dan toleran (*Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, 2000). Dalam konteks ini, pesantren telah

¹Lidya Kambo, "Liberative Dialogue :: A Comparative Analysis of the Proposals of Paul F. Knitter and Farid Esack for a Liberative Dialogue of Religions and Their Contribution to Muslim-Christian Relation in Indonesia" (Universitas Gadjah Mada, 2004), hlm. 23

²Abu Bakar, "Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama," *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama* 7, no. 2 (2015)

menjadi pilar penting untuk membangun harmoni sosial dan mencegah ekstremisme. Pasca-reformasi, Indonesia mengalami masuknya berbagai paham keagamaan transnasional seperti Wahhabisme dan Salafisme, yang sering kali membawa pandangan literal terhadap teks agama dan menolak tradisi lokal.³ Fenomena ini, menurut Martin van Bruinessen dalam *Contemporary Developments in Indonesian Islam* (2013), menimbulkan tantangan besar bagi pesantren untuk mempertahankan nilai-nilai moderasi yang telah lama menjadi ciri khasnya. Pesantren tidak hanya menjadi benteng perlindungan terhadap radikalisme, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan diskursus keagamaan yang inklusif melalui pendidikan yang menekankan prinsip *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan).

Agenda suksesi moderasi beragama bukanlah kerja yang mudah, sampai saat ini penyebaran paham moderasi beragama kerap kali justru memproduksi permasalahan baru. Salah satu peran yang cukup strategis dalam suksesi agenda ini adalah pesantren.⁴ Instansi pesantren dianggap sebagai representator moderasi beragama di Indonesia. Keseriusan akan hal ini dibuktikan dengan banyaknya kebijakan dan bantuan yang diberikan oleh pihak Kemenag. Namun demikian kasus semacam ini kemudian menimbulkan satu permasalahan yang baru.⁵ Instansi pesantren yang notabene adalah instansi agama penganut tradisionalisme-kulturar masih terlihat gagap dalam menghadapi agenda yang diciptakan oleh pemerintahan. Sehingga melahirkan dua pemikiran dan pemahaman yang berbeda. Paham pertama menganggap bahwa pesantren adalah suatu instansi pendidikan yang suci dan sakral sehingga tidak perlu mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh Kemenag. Pendapat lainnya mengatakan bahwa pesantren harus bersinergi dan bekerjasama dengan Kemenag untuk mensukseskan agenda besar moderasi beragama di Indonesia.⁶

³Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal* (Yogyakarta: Mizan, 2003)

⁴G Fealy and S White, "Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia," *Religious Life and Politics in Indonesia*, In *Expressing Islam* (2008)

⁵Shofiah Fitriani, "Keberagaman Dan Toleransi Antar Umat Beragama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (2020)

⁶Noorhaidi Hasan, "Tantangan Islam Politik Dan Krisis Legitimasi Ulama," in *Ulama Dan Negara Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019)

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini berusaha untuk menganalisis peran pesantren dalam memunculkan diskusi Moderasi beragama dan usahanya dalam mempertahankan diskursus moderasi beragama dalam lanskap konteks Indonesia yang semakin kompleks. Di sisi lain Pesantren sendiri harus bergelut dengan berbagai macam perbedaan pandangan tentang gerakan dan agenda besar tersebut. Sehingga artikel ini berfokus untuk menjawab dua pertanyaan besar yaitu, pertama: Bagaimana Pesantren dalam memunculkan diskursus moderasi beragama, dan kedua: bagaimana pesantren dalam mempertahankan diskursus moderasi beragama dalam konteks Indonesia yang semakin kompleks?

METODE PENELITIAN

Artikel ini memanfaatkan metode deskriptif-analitis dengan berbasis data kualitatif pustaka (*library research*). Yaitu mendeskripsikan objek penelitian secara konprehensif terkait sejarah dan perkembangan pesantren di Indonesia, lalu menganalisisnya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. metode analisis yang digunakan adalah pendekatan historis dan *discourse analitys*. Proses anaisis terbagi ke dalam tiga fokus kajian, pertama: merupakan proses analisis historis pesantren di Indonesia dari era pra-kemerdekaan menuju pra-reformasi. Kedua: analisis discourse pesantren pasca-reformasi, dan ketiga: analisis unsur-unsur yang berperan penting dibalik discourse tersebut.

Sumber-sumber yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan literatur yang membicarakan tentang pesantren baik berupa artikel jurnal, buku dan media online yang dianggap otoritatif. Sumber sekunder merupakan berbagai teori yang dapat membantu menjelaskan sumber primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren dan Perkembangannya di Indonesia

Catatan sejarah pesantren dengan sudut pandang antropologis, dalam buku "*The Religion of Java*", Clifford Geertz mengungkapkan pesantren sebagai contoh sinkretisme antara Islam dan budaya Jawa. Geertz menyatakan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama tetapi juga sebagai pusat budaya yang mengintegrasikan elemen-elemen lokal dengan ajaran Islam. Geertz mengatakan bahwa kiai dan santri di pesantren memainkan peran penting

dalam menjaga budaya lokal, seperti tradisi. Berbeda dengan Zamakhsyari Dhofier, menekankan bagaimana pesantren memainkan peran penting dalam perjuangan melawan kolonialisme. Menurut Dhofier, pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam serta sebagai pusat perlawanan sosial-politik melawan penjajahan Belanda. Melalui ajaran kiai, pesantren mendorong siswa untuk mempertahankan jati diri Islam dan menentang pengaruh luar. Tidak seperti perspektif Geertz, yang lebih menekankan fungsi kultural pesantren.⁷

Pandangan yang lebih modern, disampaikan oleh Azyumardi Azra, menunjukkan bagaimana modernisasi dan globalisasi mempengaruhi pesantren saat ini. Azra mengatakan bahwa kurikulum dan pendekatan pendidikan di pesantren mengalami transformasi besar. Pemulihan dari pesantren yang dulunya terisolasi disebabkan oleh perkembangan zaman, termasuk adopsi pendidikan umum, kemajuan teknologi, dan pengaruh dari komunitas Islam internasional. Perubahan ini dianggap dapat mengurangi fungsi pesantren tradisional sebagai pusat pengajaran Islam.⁸

Cerita yang mungkin paling banyak diterima kalangan masyarakat luas terutama Jawa tentang sejarah *pesantren* di Nusantara adalah dimulai sejak era *walisongo*. Yaitu ketika seorang tokoh agamawan yang dikenal dengan Sunan Ampel mendirikan sebuah pemukiman atau *gubug* tempat muslim menimba ilmu yang kemudian dikena dengan nama “Ampel Denta”. Kisah ini banyak ditransmisikan melalui khotbah-khotbah para tokoh agamawan di dataran Jawa. Pendapat menarik lainnya dikemukakan oleh seorang sejarawan Indonesia Taufik Abdullah mengatakan bahwa sejarah *pesantren* harus ditelisik melalui pendekatan *political-discourse*. Tepatnya pada saat masa kekeratonan Islam di dataran Jawa, ia menyebutkan bahwa semaraknya *pesantren* di pulau Jawa ada kaitannya dengan persaingan politik dan kekecewaan dalam tubuh kraton Mataram Islam.⁹

Kasus konflik internal dalam kraton Mataram Islam kemudian memunculkan seorang tokoh besar bernama Pangeran Diponegoro. Ia dipercayai sebagai tokoh yang menyebarkan pendidikan *pesantren* di seluruh dataran Jawa. Pada saat terjadi gesekan atau konflik mataram

⁷Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago London: University of Chicago press, 1976), hlm. 231

⁸Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal*.

⁹Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 2nd ed. (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2020), hlm. 19–20

Islam dengan kolonial Belanda, Diponegoro mengalami banyak konflik internal dengan Kraton ia kemudian memilih untuk berkelana dengan membawa para tokoh agamawan lalu mendirikan sebuah instansi pendidikan di berbagai desa yang dia kehendaki. Para peneiti menyebutnya kawanannya ini dengan ‘komunitas religius *santri*’, sedangkan desa-desa yang dijadikan sebagai tempat tinggal para agawaman (*kyai*) dan *santri* disebut dengan ‘*desa perdikan*’. Sejak saat itu banyak desa di dataran Jawa yang mengalami proses ‘*pesantrenisasi*’. Banyak atribut-atribut *pesantren* yang di bangun di desa seperti *pondok*, *langgar* dan berbagai tradisi serta kegiatan *pesantren*.¹⁰

Sekitar sejak pertengahan abad ke-19 *pesantren* dipandang sebagai simbolisasi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Selain itu *pesantren* juga memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas muslim di dataran Jawa. Bentuk perlawanan penjajah tidak hanya diaktualisasikan oleh kalangan *santri* dalam ranah aksi pertempuran secara langsung. *Pesantren* juga bergerak sebagai pembenteng ideologi Islam dan bangsa. Buktinya terdapat banyak kalangan *santri* yang pada saat itu enggan untuk mengenyam pendidikan formal pendidikan pemerintah. Sehingga kebanyakan umat Islam lebih memilih untuk menyekolahkan anak mereka di *pesantren*. pada prosesnya yang panjang *pesantren* sama sekali keluar dari bawah kendali kolonial Belanda, melainkan lebih memilih untuk menyambung jejaring dengan pusat pembelajaran negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi.¹¹

Pengaruh Arab Saudi dan Mesir di berbagai *Pesantren* Indonesia terlihat dari sistem pembelajaran yang kebanyakan menggunakan Bahasa Arab. Bahkan hampir seluruh referensi utama di *pesantren* adalah berbahasa Arab atau yang lebih dikenal dengan *kitab kuning*. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan *pesantren* ini berkaitan erat dengan Arab Saudi, di antaranya adalah banyaknya para agamawan asal Nusantara yang mengenyam pendidikan di Arab Saudi. Pada masanya di antara tokoh yang terkenal adalah Syaikh Akhmad Khatib sambas, Syaikh An-Nawawi Bantani dan K. Makhfud Termas. Bahkan tokoh-tokoh tersebut sempat menuliskan sebuah karya fenomenal dengan

¹⁰Heru Mulyanto, “Penggunaan Naskah Kuno Dan Arsip Dalam Historiografi Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis,” *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 14, no. 1 (May 31, 2023): hlm. 93

¹¹Azyumardi Azra, “The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries,” *Journal of Islamic Civilization* 12, no. 1 (2004): hlm. 66

berbahasa Arab yang sampai saat ini masih banyak dipelajari oleh berbagai *pesantren*.

Sejak memasuki era 90-an awal pasca orde baru, dimulailah munculnya beberapa *pesantren* yang menyebut diri mereka sebagai *pesantren* modern. Fenomena ini berkaitan langsung dengan gerakan reformasi Islam secara global yang diprakarsai oleh Timur Tengah. Beberapa *pesantren* yang lahir pada era ini seperti Pondok Pesantren Modern Gontor Jawa Timur yang berdiri pada 1926. *Pesantren* semacam ini mengusung paham pembaharuan Islam, sehingga karakteristik utamanya adalah mengedepankan pembelajaran bahasa Arab dan Inggris. *Pesantren* modern juga mengaku tidak terafiliasi dengan *madzhab* manapun karena dianggap sebagai penghambat perkembangan Islam. Model *pesantren* ini cukup eksis pada masanya hingga tersebar diseluruh datara Indonesia.¹²

Sejak saat itu dinamika perkembangan pesantren seolah terbagi ke dalam dua *disourse* utama. Yaitu *pesantren* yang mengusung model tradisional dan *pesantren* modernis. Seiring berkembangnya waktu *pesantren* tradisional juga banyak berkembang di daerah kota maupun pedesaan, beberapa diantaranya yang cukup terkenal adalah seperti Pesantren Lirboyo Kediri, Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta dan berbagai pesantren lainnya. Kedua wacana terus berkembang sampai saat ini dan masih tetap eksis dalam mengemas model pesantren yang mereka pahami masing-masing. Pesantren tradisional tersebut kemudian dikenal dengan *pesantren salaf*, sedangkan pesantren modern dikenal dengan Pondok Psantren Modern.

Moderasi Beragama dalam Ranah Teoritis

Moderasi beragama menekankan pentingnya keseimbangan dan sikap inklusif dalam beragama, sebagaimana tercermin dalam berbagai pandangan para ahli. Azyumardi Azra menyatakan bahwa moderasi beragama di Indonesia merupakan “*a balance between religious orthodoxy and cultural adaptation*,” mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam universal dengan kearifan lokal yang membentuk harmoni sosial.¹³ Yusuf Al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa*

¹²M. Falikul Isbah, “Pesantren in the Changing Indonesian Context: History and Current Developments,” *QJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 1 (June 22, 2020): hlm. 17

¹³Azra, “The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.”

al-Tajdid mendefinisikan moderasi sebagai “*sawad al-a‘zam*” atau jalan tengah. Ia menjelaskan, “*Al-wasatiyyah hiya sawad al-a‘zam, wa innaha tatahaqqaq bi‘l-‘adalah wa‘l-i‘tidal,*” yang berarti moderasi terwujud melalui keadilan dan keseimbangan. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak memihak pada ekstremisme maupun liberalisme.

Muhammad Abduh memperkuat argumen ini dengan mengatakan, “*Islam is not against progress, but embraces it as long as it aligns with moral and ethical principles.*” Abduh melihat moderasi sebagai jalan untuk menjembatani ajaran Islam dengan perkembangan sains dan teknologi.¹⁴ Sementara itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegaskan bahwa moderasi adalah esensi pluralisme Indonesia, dengan menyebut, “*Moderasi adalah cara umat beragama untuk menjunjung nilai kemanusiaan di atas identitas sektarian.*” Gus Dur percaya bahwa moderasi mampu menciptakan keadilan sosial di tengah keragaman agama dan budaya.¹⁵

Dalam perspektif Al-Qur’an, konsep *ummatan wasatan* (QS. Al-Baqarah: 143) menekankan pentingnya umat Islam sebagai komunitas yang adil dan seimbang. Ayat tersebut menyatakan, “*Wa kadhhalika ja‘alnakum ummatan wasatan...*” (Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang adil dan pilihan). Hal ini dikuatkan oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur), yang menegaskan bahwa moderasi adalah manifestasi nyata dari ajaran Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*.¹⁶ Ia mengatakan, “*Moderasi memungkinkan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.*” Seyyed Hossein.¹⁷ melihat moderasi sebagai keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Ia menyebut, “*Islam’s middle way reflects the balance between the material and spiritual worlds, ensuring harmony between divine law and human needs.*” Dari perspektif Barat, John L. Esposito menyoroti bahwa moderasi Islam adalah respons terhadap globalisasi dan stereotip negatif. Ia menyatakan, “*Islamic moderation*

¹⁴Muhammad Abduh, *Al-Islām Wa al-Nasrāniyya* (Mesir: Mathba‘ah Majallah al-Manar, 1323)

¹⁵Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jawa Timur: The Wahid Institute, 200AD)

¹⁶Nurcholis Majid, *Slam, Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan* (Yogyakarta: Paramadina, 2000)

¹⁷Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (New York: HarperCollins Publishers, 2004)

*challenges the narrative of extremism by showcasing a faith rooted in peace and coexistence.”*¹⁸

Nilai moderasi beragama sebagaimana dicanangkan dalam JMN 2019–2024 oleh Kementerian Agama RI (2019:19) berpusat pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Esensi moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, kebutuhan individu dan kepentingan komunal, serta antara teks agama dan ijtihad. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa moderasi adalah tentang menjalani kehidupan beragama secara adil tanpa ekstremisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil diartikan sebagai "tidak berat sebelah, tidak memihak, dan sesuai dengan yang benar," sementara seimbang mengacu pada "cara pandang dan komitmen yang berpihak pada keadilan."

Muhammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa keseimbangan (balance) dan keadilan (justice) dalam moderasi agama menekankan pentingnya titik temu dalam keberagaman pandangan. Dalam Islam, moderasi bukan hanya nilai spiritual, tetapi juga berhubungan dengan kontribusi seorang muslim terhadap komunitasnya, terutama ketika hidup dalam masyarakat yang plural (Kementerian Agama RI, 2019:20). Moderasi ini juga menuntut sikap kesederhanaan, toleransi, persatuan, dan persaudaraan.¹⁹

Kesederhanaan dalam moderasi agama, menurut Kementerian Agama (2019:44), diwujudkan dalam cara menghadapi perbedaan. Demokrasi, misalnya, hanya dapat berfungsi ketika seseorang bersedia menahan egonya dan menerima pendapat orang lain. Toleransi menjadi fondasi utama dalam kerangka demokrasi dan moderasi agama. Selain itu, persatuan dan persaudaraan menuntut penerimaan atas prinsip-prinsip kebangsaan sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Kementerian Agama juga menekankan bahwa menjalankan ajaran agama selaras dengan memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Ini menegaskan bahwa pengamalan nilai agama tidak bertentangan dengan penguatan komitmen kebangsaan, melainkan menjadi satu kesatuan. Indikator moderasi beragama menurut Kementerian Agama (2019:43) mencakup empat aspek utama, yaitu komitmen kebangsaan,

¹⁸John L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam* (Oxford; New York: Oxford University Press, 2002)

¹⁹Majid, *Slam, Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan*.

toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi terhadap kebudayaan lokal. Keempat elemen ini menjadi pedoman bagi umat beragama untuk menjalani kehidupan harmonis dalam keberagaman.

Pesantren dan Peranannya Dibalik Diskursus Moderasi Beragama ***Model Pendidikan Pesantren***

Konsepsi seputar moderasi beragama sejatinya telah dikenalkan dari sejak zaman dahulu dalam sistem pendidikan Pesantren. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar antropolog seperti Gertz dalam *The Religions of Java* cukup mengindikasikan tentang bagaimana seorang *santri* mengenali dan memeraktikkan agama dengan cara yang moderat. Peneliti meyakini bahwa metode pendidikan yang saat ini dijalankan merupakan warisan luhur dari pesantren terdahulu yang menanamkan pendidikan moderasi beragama.

Sejak dahulu dalam pendidikan pesantren telah banyak membicarakan tentang isu-isu kekinian seperti Gender, Kemanusiaan, Ekologis dan kemajuan teknologi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian Masmuni Mahatma yang berjudul *Pendidikan Moderasi Beragama di Pesantren Sunanul Huda Sukabumi, Jawa Barat*. Penelitian tersebut banyak menyebutkan peran pesantren Sunanul Huda Sukabumi dalam mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama. Bahkan tentang isu-isu di atas sudah sejak dulu pesantren tersebut membahasnya. Hal ini menunjukkan betapa sebetulnya pesantren memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan diskursus moderasi beragama di masa sekarang.²⁰

Secara lebih umum Pesantren juga mengedepankan pendidikan tentang berbagai pandangan dan aliran keagamaan di pesantren memainkan peranan penting dalam memperluas wawasan santri, membentuk sikap inklusif, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk berdialog secara konstruktif dan menghormati perbedaan. Prinsip moderasi Islam, yang menekankan keterbukaan dan penghargaan terhadap keragaman, bukan hanya diterapkan dalam pembelajaran fikih atau tauhid, tetapi juga menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman agama yang moderat (*tawasuth*), Pesantren dalam sejarahnya selalu mengintegrasikan proses deradikalisasi. Hal ini relevan mengingat salah satu faktor pemicu radikalisme adalah interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama.

²⁰Isbah, “Pesantren in the Changing Indonesian Context.”

Said Aqil Siradj menjelaskan bahwa pesantren meneladani metode dakwah dan perilaku para wali, yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menyesuaikannya dengan berbagai aspek kehidupan. Selain mengajarkan hukum Islam (*fiqh aḥkām*) secara ketat dan mendalam, pesantren memberikan bekal pemahaman hukum berdakwah (*fiqh da'wah*), yaitu cara berdakwah yang fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pemahaman masyarakat. Tingkatan pengajaran tertinggi di pesantren adalah *fiqh hikmah*, yang bertujuan menjadikan Islam diterima oleh semua kalangan, baik umat Islam dari berbagai latar belakang, maupun mereka yang berbeda keyakinan. Pendekatan ini menunjukkan kebijaksanaan pesantren dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang toleran dan inklusif. Dalam hal ini setidaknya terdapat beberapa pola pendidikan pesantren yang menjadi peletak dasar konsep moderasi beragama.²¹

Pertama: Pendidikan pesantren tidak pernah dari pola integrasi nilai. Maksudnya adalah pesantren selalu menyatukan berbagai sisi kelimuan sebagai pijakan dalam kehidupan. Sebagai contoh dalam pengajaran tentang fikih, akidah, dan sejarah Islam, Pesantren selalu berusaha mengintegrasikan dari berbagai disiplin ilmu tersebut menjadi satu-kesatuan nilai yang harus dipahami secara substansi. Konsep semacam ini yang kemudian disebut oleh Yusuf Al-Qardawi sebagai *al 'adalah*. Di pesantren pembelajaran tentang gramatikal Arab bukan hanya sekedar mengajarkan tentang bagaimana pola bahasa Arab, melainkan selalu ada pengajaran yang sifatnya adalah filosofis. Hal itu dapat dilihat dari bahan bacaan seperti kitab *Al-Jurumiyah* dan *Alfiyah Ibn Malik* yang dikenal sebagai kitab gramatikal Arab bercorak filosofis. Begitu juga dalam pembelajaran fikih, pesantren tidak hanya mengajarkan tentang mana yang halal dan haram, melainkan mengajarkan hikmah dibaliknya (*fiqh hikmah*). Hal itu dapat dilihat dari referensi yang selalu digunakan seperti dalam kitab *Bidayatul Hidayah* karya Imam al-Ghazali.

Kedua: pesantren merupakan institusi pendidikan yang telah lama mengajarkan keseimbangan antara ortodoksi agama dan adaptasi budaya. Tradisi ini menghasilkan praktik keagamaan yang tidak hanya patuh pada hukum Islam, tetapi juga menghargai kearifan lokal. Azra menyebut

²¹Ai Fatimah Nur Fuad, “Kajian Literatur Tentang Perkembangan Historis Dan Transformasi Dakwah Gerakan Tarbiyah Di Indonesia,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 17, no. 2 (February 20, 2020): hlm. 349–382

bahwa pesantren adalah tempat di mana “Islam menjadi rahmat bagi semua, melalui sikap inklusif dan toleran.” Fenomena semacam ini terjadi karena dalam pendidikan Pesantren selalu dikaitkan dengan konteks kebudayaan dan tradisi yang ada di Nusantara. Bahkan jika merujuk pada pendapat Gertz bahwa Pesantren adalah salah satu sistem pendidikan yang seringkali berintraksi dengan budaya dan lingkungan sekitar. Pendapat juga dikuatkan dengan fakta yang ada bahwa pesantren kebanyakan beridri di tengah-tengah plosok desa atau kampung dan pegunungan. Hal itu merupakan suatu simbol bahwa pesantren sangat lekat dengan lingkungan dan kebudayaan.²²

Ketiga: Pendidikan di pesantren juga mendorong santri untuk memahami berbagai mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Hal ini memperkuat nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholish Madjid, yang menyebut pesantren sebagai wadah penting untuk membangun sikap *tawasuth* (moderat). Menurut Cak Nur, “Pesantren adalah benteng Islam moderat yang menjaga nilai-nilai keberagaman dalam harmoni.” Pembelajaran secara komprehensif di pesantren juga menjadi salah satu landasan utama gagasan moderasi beragama. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan pendapat para ulama tampaknya menjadikan wawasan para santri semakin terbuka dan tidak mudah untuk menerima paham-paham transnasional.²³

Pada poin ini, pembahasa utamanya adalah terletak pada landasan ekosistem pengetahuan yang dibangun oleh setiap pesantren di Indonesia. Penjelasan yang telah diutarakan tersebut merupakan aspek dasar bagi Pesantren dalam membentuk suatu ekosistem tentang pemahaman moderasi beragama di Indonesia. Jika di lihat dalam sudut pandang kajian wacana, pesantren membawa wacana paham moderat sejak dalam pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren tersebut yang terus bertahan dengan ciri khasnya sampai saat ini menjadi dominasi kuat dalam terbentuknya wacana moderasi beragama di Indonesia.

Memasuki Arena Publik

Moderasi beragama di Indonesia dikonsepsikan oleh Kementerian Agama yang pada intinya sebagai cara pandang dan sikap beragama yang seimbang, mengedepankan asas kemanusiaan dan menghargai karifan

²²Geertz, *The Religion of Java*.

²³Majid, *Slam, Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan*.

budaya lokal. Konsepsi ini tentunya tidak serta-merta muncul tanpa adanya suatu otoritas yang mendominasi dan memrakarsai. Dalam konteks ini perlu dicatat bahwa pesantren menjadi salah satu dominator pembentuk wacana tentang pentingnya mdoerasi beragama di Indonesia.²⁴ Pasalnya wacana ini muncul berkenaan dengan konteks ke Indonesiaan yang pada masa pasca-reformasi banyak mengalami dinamika pergolakan agama, budaya dan politik. Sehingga pada masanya Pesantren menjadi salah satu instansi yang cukup kuat otoritasnya dalam membentuk diskursus moderasi beragama di Indonesia.

Era pasca-reformasi di Indonesia, yang dimulai setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, ditandai oleh kebebasan politik dan kebangkitan ekspresi keagamaan yang lebih beragam. Dalam konteks sosial-keislaman, periode ini membuka ruang bagi masuknya berbagai paham Islam transnasional, termasuk Wahabisme dan Salafisme, yang sebelumnya sulit berkembang di bawah pengawasan ketat negara. Paham-paham ini, yang sering kali membawa interpretasi agama yang lebih literal dan rigid, mendapatkan momentum melalui organisasi-organisasi dakwah, pendidikan, dan media sosial, menjangkau kalangan muda Muslim perkotaan dan sebagian pesantren modern di Indonesia.²⁵

Masuknya paham transnasional seperti Wahabi dan Salafi memunculkan tantangan terhadap tradisi Islam lokal yang telah lama dipelihara oleh pesantren. Tradisi pesantren, yang didasarkan pada praktik Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendekatan fikih Syafi'i, akidah Asy'ariyah, dan tasawuf Al-Ghazali, sering kali berbenturan dengan pendekatan literal dari paham-paham baru ini. Martin van Bruinessen dalam *Contemporary Developments in Indonesian Islam* mencatat bahwa paham transnasional sering kali menolak praktik lokal seperti ziarah kubur dan tradisi Maulid, yang dianggap sebagai bagian dari warisan Islam Nusantara.²⁶ Pesantren menjadi salah satu lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika ini, baik sebagai benteng pertahanan Islam moderat maupun sebagai sasaran dakwah paham transnasional. Menurut Noorhaidi Hasan, sebagian pesantren yang bersifat modernis atau memiliki akses ke jaringan internasional cenderung terparpar oleh paham

²⁴Imron Rosyadi Hamid and Aji Said Muhammad Iqbal Fajri, "The Contributions of Nahdlatul Ulama to World Peace: A Taxonomy Literature Review," *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (March 1, 2024): hlm. 25–35

²⁵ Fealy and White, "Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia."

²⁶Martin Van Bruinessen, "Global and Local Indonesia," *Southeast Asian Studies* 2 (September 1999)

transnasional ini, sementara pesantren tradisional lebih aktif mempertahankan tradisi lokal.²⁷

Konteks ini mempertegas posisi pesantren sebagai arena penting dalam membendung radikalisasi. Ahmad Baso menekankan bahwa pesantren tradisional memegang peran vital dalam mempromosikan Islam yang ramah, moderat, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Pesantren menjadi garda depan dalam mengajarkan Islam yang menghargai keragaman, sehingga mampu merespons tantangan ideologi transnasional dengan cara yang konstruktif dan adaptif.

Gagasan Para Aktor Kharismatik: KH Ali Maksum dan Gagasan Ukhuwah Wathaniyah

Artikel ini berargumentasi bahwa dibalik dominasi diskursus moderasi baragama tidak terlepas dari beberapa aktor penting. Beberapa aktor tersebut merupakan representator dari institusi pesantren yang menjadi pengaruh besar dalam perjalanan dan dinamika sosial politik keagamaan di Indonesia. Dalam hal ini peneliti mencoba menggambarkan beberapa tokoh tersebut yang dianggap sangat berperan dibalik suksesi diskursus moderasi beragama di Indonesia

KH Ali Maksum atau yang kerap disapa dengan Kiai Ali merupakan salah satu tokoh besar pada era 90-an yang dianggap sangat berpengaruh dalam meletakkan karakter kebangsaan. Kiai Ali merupakan seorang ulama besar yang lahir di Lasem Jawa Tengah pada 1915, merupakan seorang murid dari Syekh Dimiyathi Tremas di Pacitan, KH Ali Maksum juga menantu ulama besar ahli Al-Qur'an yaitu KHM Munawwir Krapyak Yogyakarta. Ia mengawali kiprahnya melalui organisasi Islam terbesar di Indonesia NU dengan membangun akar kekuatan struktural NU. Dalam hal ini Kiai Ali terus berupaya untuk menjaga persatuan umat Muslim di tengah-tengah krisis kemanusiaan. Tepatnya pada masa transisi kekuasaan order lama ke orde baru, Kiai Ali dianggap sebagai tokoh pesantren yang mampu mengawal dan mempertahankan Khittah NU, hal ini merupakan salah satu upayanya dalam menyelamatkan NU dari kepentingan-kepentingan kontraproduktif seperti politik praktis dan semacamnya. NU di bawah Kiai Ali lebih

²⁷Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad; Islam, Militansi, Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru*, trans. Hairus Salim (Jakarta, Indonesia: enerbit Pustaka LP3S, 2008)

menfokuskan pada modernisasi ulama, pesantren serta pembangunan karakter umat bagi bangsa Indonesia.²⁸

Kiai Ali Maksum merupakan sosok ulama yang tidak hanya meneruskan perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama (NU) tetapi juga menjaga kesinambungan dalam pengembangan karakter bangsa. Sebagai penerus perjuangan Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri bangsa sekaligus tokoh yang membela kemerdekaan Indonesia, Kiai Ali memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif. Ia melanjutkan kiprah para ulama senior NU yang menetapkan "presiden, pemerintah, dan parlemen" setelah kemerdekaan Indonesia sebagai *waliyul amri dlaruri bissyaukah*, yakni otoritas yang sah dan harus ditaati oleh rakyat. Menurut Greg Fealy dalam *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967* (1998), keputusan NU tersebut berfungsi sebagai respon terhadap gerakan Darul Islam (DI) yang berupaya mendirikan negara Islam di Indonesia. Pandangan ini menunjukkan komitmen NU untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan menjaga konsensus nasional, sebuah warisan yang juga dijaga oleh Kiai Ali. Dalam perspektif tersebut, Kiai Ali memperkuat posisi NU dan Pesantren sebagai penjaga harmoni antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, menjadikannya figur sentral dalam membangun karakter bangsa yang religius, moderat, dan nasionalis.²⁹

Langkah stretegis Kiai Ali yang lainnya adalah dengan mengupayakan penanaman dasar-dasar kerukunan antar umat beragama. Hal itu diaktualisasikan dengan sikap positif dan dukungannya terhadap berbagai forum ukhuwah yang lahir pada tahun 1970-an dan 1980 untuk mengatasi berbagai krisis besar umat Islam di Indonesia. Beberapa peneliti seperti Zuhdi Mukhdlor dalam penelitiannya yang berjudul *K.H. Ali Maksum: Perjuangan dan Pemikiran-Pemikirannya* (1998), menyebutkan bahwa Kiai Ali merupakan plopore utama dibalik gagasan *ukhuwah Islamiyah* (persamaan akidah), *ukhuwah basyariyah* (kemanusiaan), dan *ukhuwah wathaniyah* (perasaan satu bangsa dan negara)

²⁸Hamid and Muhammad Iqbal Fajri, "The Contributions of Nahdlatul Ulama to World Peace."

²⁹Ilma Kharismatunisa' and Mohammad Darwis, "Nahdlatul Ulama Dan Perannya Dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah Pada Masyarakat Plural," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (August 15, 2021): hlm. 141

Tindakan Kiai Ali yang juga dianggap begitu mempengaruhi wacana keagamaan di Indonesia adalah perhatiannya terhadap beberapa kebijakan-kebijakan rezim Soeharto. Kiai Ali tidak segan-segan untuk mengkritik dan menegur jikalau terdapat kebijakan yang dianggap diskriminatif dan menimbulkan perpecahan. Disamping itu Kiai Ali juga kerap kali menyalurkan pemikiran-pemikirannya melalui media *Pers Nasional*. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk dan upayanya dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Sikap Kiai Ali terhadap Pancasila dan UUD 1945 juga dianggap sebagai suatu pilar yang merubah arah pandang beragama bagi masyarakat muslim Indonesia. Secara tegas Kiai Ali mengawal dan mendukung Munas Alim Ulama NU di Sukorejo, Situbondo tahun 1983. Yang mana dalam munas tersebut menekankan penerimaan terhadap asas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam pidatonya pada acara Musyawarah Nasional Alim Ulama, Kiai Ali Maksum secara jelas menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah pijakan perjuangan NU sekaligus falsafah bangsa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau juga mendorong umat Islam untuk tidak hanya memahami Pancasila dari sudut pandang keagamaan, tetapi juga dengan pendekatan filosofis. Dengan cara ini, diharapkan tercipta pemahaman yang seragam mengenai Pancasila di kalangan masyarakat, memperkuat kesatuan dalam keberagaman.³⁰

Eksistensi Kiai Ali pada masa Orba dapat dibilang sebagai tokoh sentral dibalik suksesnya diskursus moderasi beragama di Indonesia. Kehadirannya yang merupakan bentuk representasi dari Pesantren memberikan wajah model keberagaman yang segar dan moderat dalam lanskap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat dikatakan bahwa diskursus moderasi beragama pada masa ini sejatinya sudah dirumuskan secara serius oleh banyak tokoh pesantren dan diprakarsai oleh Kiai Ali Maksum sebagai tokoh yang paling berpengaruh.

Gus Dur dan Gagasan Pribumisasi Islam

Gus Dur, atau Abdurrahman Wahid, adalah figur yang tidak hanya merepresentasikan nilai-nilai pesantren tetapi juga menjadi bagian integral dari tradisi tersebut. Sebagai cucu dari Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, pendiri Pesantren Tebuireng dan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Dur lahir, dibesarkan, dan dididik dalam lingkungan pesantren. Pendidikan awalnya di pesantren memberikan dasar yang kuat

³⁰Kustini, ed., *Monografi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Litbangdiklat Press, 2019)

dalam keilmuan Islam, khususnya dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang menekankan prinsip tawasuth (moderasi), tawazun (keseimbangan), dan tasamuh (toleransi). Lingkungan pesantren membentuk cara pandangnya yang inklusif dan menjadikan Gus Dur sebagai simbol modernisasi nilai-nilai pesantren dalam konteks keindonesiaan.³¹

Sebagai bagian dari pesantren, Gus Dur tidak hanya memahami Islam dalam dimensi doktrinal tetapi juga sebagai praktik sosial yang relevan dengan konteks Indonesia yang majemuk. Tradisi pesantren yang mengutamakan dialog dan keberagaman menjadi landasan pemikiran Gus Dur dalam mempromosikan moderasi beragama. Pesantren, menurut Greg Fealy dalam *Islamic Schools in Indonesia and Their Roles in Moderation*, adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam melestarikan nilai-nilai Islam Nusantara yang toleran. Gus Dur memperluas peran ini ke ranah nasional, menjadikan nilai-nilai pesantren sebagai paradigma dalam membangun harmoni di tengah tantangan keberagaman. Sebagai bagian dari pesantren, Gus Dur juga menjadi penjaga tradisi intelektual yang terbuka terhadap perubahan zaman. Melalui peran sosial dan politiknya, ia membuktikan bahwa pesantren adalah lembaga yang adaptif terhadap tantangan global, termasuk meningkatnya pengaruh ideologi transnasional seperti Wahhabisme dan Salafisme. Gus Dur dengan tegas menolak radikalisme yang bertentangan dengan nilai Islam Nusantara, sebagaimana pesantren telah lama menjadi penjaga keislaman yang harmonis dengan budaya lokal.³²

Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, memainkan peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama di Indonesia pada masa pemerintahannya (1999–2001), di tengah-tengah situasi sosial yang penuh tantangan. Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, Indonesia mengalami gelombang kebebasan politik yang juga memunculkan konflik berbasis agama dan etnis. Konflik di Ambon, Poso, dan Sambas pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an menjadi contoh nyata krisis toleransi di Indonesia. Situasi ini diperburuk oleh masuknya ideologi transnasional seperti Salafisme dan Wahhabisme, yang sering kali bertentangan dengan tradisi Islam Nusantara. Dalam kondisi tersebut, Gus Dur memanfaatkan jabatannya sebagai presiden dan tokoh agama

³¹Hasan Sazali and Ali Mustafa, “New Media Dan Penguatan Moderasi Beragama Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi* 17, no. 2 (April 3, 2023): hlm. 167–184

³²Siti Yumnah, “Construction of Islamic Boarding Shcool in Developing Moderate Islam,” *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (July 24, 2020): hlm. 232–246

untuk meneguhkan pentingnya pluralisme dan moderasi sebagai solusi atas krisis yang melanda.³³

Gus Dur menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar bersama yang dapat mempersatukan bangsa yang majemuk. Dalam pidato-pidatonya, ia sering menekankan bahwa Islam di Indonesia telah lama hidup berdampingan dengan tradisi lokal, menciptakan harmoni yang unik dan menjadi ciri khas Islam Nusantara. Menurut antropolog Clifford Geertz, kekayaan budaya Indonesia memberikan peluang besar untuk menciptakan integrasi sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, Gus Dur menjadikan tradisi NU (*Nahdlatul Ulama*) sebagai basis untuk mempromosikan Islam yang toleran dan humanis, menegaskan pentingnya *ukhuwah basyariah* (persaudaraan kemanusiaan) sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, kepemimpinan Gus Dur muncul pada masa ketika berbagai ideologi keagamaan transnasional mulai berkembang pesat. Menurut Martin van Bruinessen dalam *Global and Local in Indonesian Islam* (2002), fenomena ini memunculkan dinamika baru dalam kehidupan keagamaan Indonesia, di mana ideologi transnasional kerap kali menantang otoritas Islam tradisional. Gus Dur secara aktif melawan ideologi yang mengancam keragaman dan persatuan, dengan menegaskan bahwa Islam di Indonesia tidak boleh terlepas dari konteks sosial dan budaya lokal.

Konsep "Pribumisasi Islam" yang dikembangkan oleh Gus Dur menjadi pendekatan strategis dalam menghadapi tantangan ini, mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan kearifan lokal. Pada masa itu, Gus Dur juga menghadapi tantangan dari meningkatnya sektarianisme dan politik identitas yang memperparah konflik. Salah satu langkah penting yang ia ambil adalah mendorong dialog antaragama dan melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi. Gus Dur kerap mengingatkan bahwa "agama seharusnya menjadi rahmat bagi semua, bukan sumber perpecahan." Peneliti seperti Mark Woodward menilai bahwa pendekatan Gus Dur menggabungkan aspek intelektual, spiritual, dan politik dalam mempromosikan moderasi, menjadikannya figur yang mampu meredakan ketegangan di tengah situasi yang kompleks.

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, Indonesia: Prenatamedia Grub, 2014)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan yang telah disebutkan, Artikel ini menyimpulkan bahwa: Pesantren menjadi pusat pendidikan yang melahirkan diskursus moderasi beragama melalui pengajaran nilai-nilai toleransi, harmoni sosial, dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Pesantren secara historis telah mengintegrasikan ajaran Islam dengan kearifan lokal, membangun tradisi yang ramah dan inklusif. Pola pendidikan pesantren, yang menekankan integrasi ilmu agama dengan konteks budaya, menjadi landasan penting dalam membentuk pemahaman agama yang moderat. Pesantren juga berkontribusi dalam membendung paham transnasional yang sering kali bertentangan dengan tradisi Islam Nusantara.

Pesantren mempertahankan diskursus moderasi beragama melalui adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya. Pesantren tradisional memelihara ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara ortodoksi agama dan adaptasi budaya. Selain itu, tokoh-tokoh pesantren seperti KH Ali Maksum dan Abdurrahman Wahid memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi melalui gagasan ukhuwah wathaniyah dan pribumisasi Islam. Dalam konteks ini, pesantren berfungsi sebagai ruang dialog, edukasi, dan pembentukan karakter masyarakat yang inklusif, berkontribusi pada stabilitas sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Al-Islām Wa al-Nasrāniyya*. (Mesir: Mathba'ah Majallah al-Manar, 1323).
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal*. (Yogyakarta: Mizan, 2003).
- . “The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.” *Journal of Islamic Civilization* 12, no. 1 (2004).

- Bakar, Abu. “Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama.” *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama* 7, no. 2 (2015).
- Bruinessen, Martin Van. “Global and Local Indonesia.” *Southeast Asian Studien* 2 (September 1999).
- Esposito, John L. *What Everyone Needs to Know About Islam*. (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2002).
- Fealy, G, and S White. “Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia.” *Religious Life and Politics in Indonesia*. In *Expressing Islam* (2008).
- Fitriani, Shofiah. “Keberagaman Dan Toleransi Antar Umat Beragama.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (2020).
- Fuad, Ai Fatimah Nur. “Kajian Literatur Tentang Perkembangan Historis Dan Transformasi Dakwah Gerakan Tarbiyah Di Indonesia.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 17, no. 2 (February 20, 2020): 349–382.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. (Chicago London: University of Chicago press, 1976).
- Hamid, Imron Rosyadi, and Aji Said Muhammad Iqbal Fajri. “The Contributions of Nahdlatul Ulama to World Peace: A Taxonomy Literature Review.” *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (March 1, 2024).
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad; Islam, Militansi, Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Translated by Hairus Salim. (Jakarta, Indonesia: enerbit Pustaka LP3S, 2008).
- . “Tantangan Islam Politik Dan Krisis Legitimasi Ulama.” In *Ulama Dan Negara Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta, Indonesia: Prenatamedia Grub, 2014).
- Isbah, M. Falikul. “Pesantren in the Changing Indonesian Context: History and Current Developments.” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 1 (June 22, 2020).
- Kambo, Lidya. “Liberative Dialogue : A Comparative Analysis of the Proposals of Paul F. Knitter and Farid Esack for a Liberative

- Dialogue of Religions and Their Contribution to Muslim-Christian Relation in Indonesia.” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004).
- Kharismatunisa’, Ilma, and Mohammad Darwis. “Nahdlatul Ulama Dan Perannya Dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah Pada Masyarakat Plural.” *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (August 15, 2021).
- Kustini, ed. *Monografi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. (Jakarta, Indonesia: Litbangdiklat Press, 2019).
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. 2nd ed. (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2020).
- Majid, Nurcholis. *Slam, Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan*. (Yogyakarta: Paramadina, 2000).
- Mulyanto, Heru. “Penggunaan Naskah Kuno Dan Arsip Dalam Historiografi Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis.” *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 14, no. 1 (May 31, 2023).
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. (New York: HarperCollins Publishers, 2004).
- Sazali, Hasan, and Ali Mustafa. “New Media Dan Penguatan Moderasi Beragama Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi* 17, no. 2 (April 3, 2023).
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. (Jawa Timur: The Wahid Institute, 200AD).
- Yumnah, Siti. “Construction of Islamic Boarding Shcool in Developing Moderate Islam.” *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (July 24, 2020).